

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manajemen merupakan suatu kegiatan pelaksanaan yang di sebut sebagai “manajemen pengelolaan, dan pelaksanaannya di sebut sebagai manajer atau pengelola (Fatmawati 2019:1). Organisasi, baik di sektor publik dan swasta, harus memiliki tujuan yang harus di capai. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen yang efektif di perlukan, serta penjalankan fungsi-fungsi yang di perlukan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas serta menjalankan program-programnya.

Untuk memenuhi kebutuhan program, pengetahuan, keterampilan, metode, instrumen, dan teknik yang di gunakan, hal ini di kenal sebagai manajemen program. Manajemen program melihat bagaimana berbagi tugas berinteraksi dan membantu menentukan metode pengelolaan program yang terbaik. Beberapa keuntungan dari menerapkan manajemen program seperti:

1. Mampu mengatasi kendala atau konflik sumber daya yang terjadi karena terdapat lebih dari satu proyek dalam satu program.
2. Mampu menyelaraskan arah strategis organisasi yang mempengaruhi tujuan dan sasaran proyek dan program.
3. Membantu menyelesaikan masalah dan mengubah manajemen di seluruh sistem tata kelola (Duncan, 2013).

Stoner dalam Abdul (2014:3) mengatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi untuk dapat tercapainya suatu tujuan yang ingin di capai. Banyak literatur dapat di temukan

yang merujuk pada definisi manajemen para ahli. Hal ini berarti bahwa pengertian sering berbeda satu sama lainnya.

Ada beberapa perspektif berbeda mengenai manajemen, yakni :

1. Memandang manajemen merupakan suatu proses dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui interaksi sumber daya dan pembagian tugas secara profesional.
2. Memandang manajemen sebagai upaya seseorang untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengoptimalan sumber daya manusia, material, dan keuangan.
3. Manajemen dianggap sebagai cara untuk mengatur dan mengintegrasikan berbagai sumber daya manusia untuk mencapai berbagai tujuan.
4. Manajemen dianggap sebagai bentuk pekerjaan yang membutuhkan koordinasi sumber daya, tanah, tenaga kerja, dan modal untuk tercapainya suatu tujuan organisasi.

Berbagai perspektif di atas dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya mengacu pada pencapaian tugas organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan umum maupun khusus. Untuk mencapai tujuan organisasi, sumber daya manusia (tenaga kerja), material (tanah), keuangan (modal), dan sumber daya yang digunakan harus dikelola secara profesional dan proporsional.

Dalam Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang termasuk dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan lebih terperinci diatur melalui PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2020.

Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2018 berkenaan pada Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2018-2022 sebagaimana telah di ubah oleh Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 398 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2018-2022.

Keputusan yang di buat oleh kepala desa dan Bupati atau walikota, yang masing-masing di tandatangi oleh lurah atas nama masing-masing, menentukan kepengurusan PKK yang di sebutkan pada ayat 3. Menurut pasal 29, perencanaan gerakan PKK di lakukan melalui sepuluh program pokok utama PKK. Dalam Rencana induk gerakan PKK dan strategi gerakan PKK di dasarkan pada program ini, yang termasuk ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, “ Keluarga di cirikan oleh tanggung jawab dan di dedikasikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menciptakan kehidupan pada keluarga yang harmonis.”

Salah satu program kesehatan yang ditawarkan oleh pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) ini adalah pencegahan dan penurunan angka stunting. Dimana stunting merupakan permasalahan kurangnya gizi dalam jangka panjang dan di sebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak baik dan tidak tertata selama waktu yang cukup lama, karena pemberian makanan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Stunting dapat terjadi ketika janin dalam kandungan dan baru muncul saat anak berusia dua tahun. Makanan yang di konsumsi selama kehamilan dan masa balita mempengaruhi stunting ini. Stunting

juga dapat disebabkan oleh kurangnya wawasan ibu tentang kesehatan dan nutrisi sebelum kehamilan dan selama nifas, keterbatasan layanan pada bidang kesehatan, kurangnya akses ke makanan yang bergizi, dan kurangnya akses ke sanitasi dan air bersih (Dian Rosa Sunaryo, 2020).

Stunting merupakan suatu kondisi gagal pertumbuhan yang terjadi pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkelanjutan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi bidang kesehatan dan masyarakat. Hal ini juga bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi juga dalam masalah sosial dan ekonomi yang menimbulkan dampak kualitas sumber daya manusia suatu negara. Dalam situasi ini, pemberdayaan masyarakat juga berperan penting dalam upaya penanggulangan untuk stunting, terutama pada stunting yang kerap kali merupakan suatu masalah yang kompleks atau rumit serta melibatkan banyak faktor.

Untuk mencegah stunting, masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaan program pencegahan. Dalam hal ini mereka memiliki kemampuan untuk membantu dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau program. Pemberdayaan masyarakat juga dalam pencegahan stunting ini bukan hanya sekedar memberi tau orang/masyarakat saja, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk bertindak dan berpartisipasi aktif dalam perubahan. Untuk dapat mengatasi permasalahan stunting dan meningkatkan kualitas hidup generasi berikutnya, pemerintah, organisasi, masyarakat, dan individu harus saling bekerja sama, merangkul untuk mengurangi kenaikan angka stunting di daerah kita masing-masing, khususnya pada lokasi penelitian peneliti.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Berkaitan dengan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga memasukkan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2020 memperjelasnya. Kelompok PKK disusun meliputi :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Bidang berdasarkan dengan persyaratan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan PKK di Desa Alur Baung, sebagai tindak lanjut dari PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2020. Melalui program GAMMAWAR, yang berarti “Gampong/Desa Mawaddah Warahmah”. Dibutuhkan sepuluh program utama PKK untuk menggerakkan program ini, yaitu:

1. Penghayatan dan pengamalan pancasila.
2. Gotong royong.
3. Pangan.
4. Pakaian.
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
6. Pendidikan dan Keterampilan.
7. Pengembangan kehidupan berkoperasi.
8. Kesehatan.
9. Kelestarian lingkungan hidup. dan
10. Perencanaan kesehatan.

Berdasarkan observasi peneliti, peneliti menemukan bahwa Desa Alur Baung memiliki program pokok dalam program pemberdayaan kesejahteraan

keluarga (PKK) di desa. Adapun program yang telah di laksanakan di desa adalah program di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat stunting atau kematian balita di Desa Alur Baung. Dalam program ini, PKK melakukan kegiatan sembilan puluh hari untuk memberikan asupan makanan yang bergizi pada balita yang mengalami pertumbuhan buruk. Anggota-anggota kader kesehatan posyandu dan ibu Geuchik yang bertanggung jawab langsung dalam kegiatan ini dengan di dampingi oleh Kepala Desa dan Bidan kesehatan Desa.

Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini juga telah melakukan semaksimal mungkin untuk menjalankan program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan stunting di Desa Alur Bang. Para kader PKK dan posyandu melakukan kegiatan untuk mengelola dan mengatur secara efektif untuk mengurangi angka stunting secara optimal. Kader PKK ini juga melakukan kegiatan rutin setiap hari sesuai dengan jadwal mereka untuk memberikan nutrisi kepada anak stunting. Selain itu, mereka juga melakukan posyandu setiap satu bulan sekali untuk balita, ibu hamil, remaja, dan lansia. Kegiatan ini dapat menunjukkan kemajuan dan perkembangan kesehatan masyarakat dan meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya kesehatan bagi balita dan orang lain.

Berhubungan dengan kualitas ketenagakerjaan (SDM), masalah stunting menjadi salah satu perihal yang paling vital untuk di tangani saat ini. Stunting ialah kondisi dengan pertumbuhan yang gagal pada balita. Stunting juga merupakan kegagalan tumbuh kembang yang terjadi pada balita karena kurangnya nutrisi dan infeksi kronis, yang di utamakan selama 1000 hari pertama kehidupan (PHK). Stunting tidak hanya menyebabkan masalah dengan kondisi

pertumbuhan fisik dan kerentanan terhadap penyakit saja, tetapi juga di sebabkan pada masalah dengan pertumbuhan kognitif, yang berdampak pada sistem kecerdasan serta produktifitas anak pada generasi yang akan datang. Selain itu, stunting dapat di sebabkan oleh berbagai faktor, bukan hanya masalah kesehatan. Ini termasuk pada hal-hal seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Dari berbagai pernyataan di atas tentang penyebab stunting, Kader PKK, yang merupakan titik pusat transformasi masyarakat yang juga di perlukan peran seorang Kader PKK dan posyandu untuk menangani berbagai masalah masyarakat baik di bidang kesehatan maupun bidang lainnya. Contohnya adalah masalah kesehatan dan pemberdayaan kader melalui penyebaran sumber informasi pada bidang kesehatan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah para kader PKK setuju tentang upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui penyebaran informasi kesehatan dan meningkatkan partisipasi mereka. Kegiatan pemberdayaan kader PKK yang sistematis dan menyeluruh dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pelatihan tentang pengukuran status gizi dapat membantu mencegah stunting (Isnani & Dinni, 2020). Tujuan dari kegiatan pelatihan dan juga pengabdian ini adalah untuk memberikan kader PKK kesempatan dalam memperluas kemampuan dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya. Yang nantinya dapat berupaya dalam kegiatan pencegahan stunting di Desa Alur Baung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun permasalahan yang lain mengenai program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat (PKK) di Desa Alur Baung, yaitu terkait dengan kurangnya ketenagakerjaan yaitu pada sumber daya manusia terutama pemberdayaan perempuan. Adapun pemberdayaan bagi kaum perempuan

khususnya anggota PKK masih belum optimal dan perlu di berdayakan lagi demi menambah wawasan para kader PKK dan posyandu dalam menjalankan dan mensukseskan program pencegahan stunting. Karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Alur Baung yaitu petani. Maka dari itu masyarakat banyak yang tidak berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Mengenai Dana anggaran juga sudah di sediakan oleh Desa Sebesar Rp.18.000.000, namun dana tersebut tidak di alokasikan dengan baik oleh kepengurusan PKK dan tidak di perincikan untuk apa saja kebutuhan yang akan di keluarkan dari anggaran dana tersebut. Hal tersebut juga menjadi salah bentuk dari penghambat dalam melaksanakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Alur Baung (Kader PKK 2023).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang di paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian mengenai Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Alur Baung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada pembaca dan juga dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan agar PKK di desa tersebut dapat berkembang sebagaimana mestinya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Manajemen Program PKK dalam Pencegahan Stunting di Desa Alur Baung ?

2. Apa Saja Penghambat dalam Pelaksanaan Program PKK untuk Pencegahan Stunting Di Desa Alur Baung Kabupaten Aceh Tamiang?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Dari hasil perumusan suatu masalah penelitian di atas maka fokus ataupun lokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pencegahan Stunting di Desa Alur Baung yang berfokus pada PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita Stunting, bumil, dan balita BGM (Bawah Garis Merah).
2. Mengidentifikasi Penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program PKK dalam Penanganan Stunting di Desa Alur Baung. Yang di fokuskan pada sumber anggaran dan potensi sumber daya manusia dalam melaksanakan program pencegahan stunting di Desa Alur Baung Kabupaten Aceh Tamiang.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sejalan dari permasalahan yang telah di deskripsikan di atas, bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu,sebagai berikut :

1. Mengetahui Manajemen Program PKK dalam Pencegahan Stunting di Desa Alur Baung.
2. Mengetahui penghambat dalam pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Di Desa Alur Baung Kabupaten Aceh Tamiang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menghasilkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan tujuan yang ingin di capai. Adapun beberapa manfaat yang di harapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini di harapkan dapat ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi publik, dimana mampu memberikan pengaruh dan perubahan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang dan lebih inovatif.
2. Manfaat Secara Akademis, Diharapkan dapat di gunakan sebagai masukan bagi peneliti dengan melihat permasalahan yang sama, sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi kritikan terhadap permasalahan yang akan di teliti, untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi kedepannya.
3. Manfaat Secara Praktis, Diharapkan dapat membantu dan menjadikan bahan masukan ataupun bahan informasi bagi Tim Penggerak PKK dan anggotanya dalam melaksanakan kegiatan.